

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

Trisna Eka Sari

trisnaekasari888@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Bengkalis

Delia Desvianti

deliadesvianti0@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Bengkalis

Zulfikar Pakaya

Zulfikarpakaya@gmail.com

IAIN Sultan Amang
Gorontalo

Abstract

The capital expenditure of Bengkalis Regency fluctuates, this will disrupt the regional development process of Bengkalis Regency. This study aims to look at the effect of GRDP and Balance Fund on Capital Expenditure. The sampling technique used in this study is a census. The data used in this study are secondary data obtained from the Budget Realization Report and the Bengkalis Regency GRDP Report. Multiple Regression Analysis is used to see the effect of the independent variable on the dependent variable. The results showed that Gross Domestic Regional Product (GRDP) and Balance Fund partially had no effect on capital expenditure.

Keywords: *GRDP, Balance Fund, Capital Expenditure*

1. PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kinerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah

harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Pemerintah daerah berperan sebagai penggerak perekonomian melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dialokasikan sejumlah dana dalam bentuk belanja modal. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa deskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal. Berikut adalah realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkalis:



Sumber: LRA Kabupaten Bengkulu (2023)

Gambar 1. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Bengkulu

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa belanja modal kabupaten Bengkulu periode tahun 2012-2021 berfluktuatif. Pengalokasian belanja modal terendah terjadi pada tahun 2020, hal ini kurang berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi karena belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Sumarsono et al., 2017). Selain itu belanja modal juga sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberi pelayanan kepada publik (Saputra, 2022). Dalam memberikan layanan publik ke masyarakat, penetapan belanja modal yang baik menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Dalam menetapkan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menentukannya berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang digunakan untuk fasilitas publik. Jika investasi belanja modal meningkat, maka penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian angka-angka dalam PDRB di bedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar tahun berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Berikut diagram realisasi anggaran Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bengkulu Tahun 2012-2021:



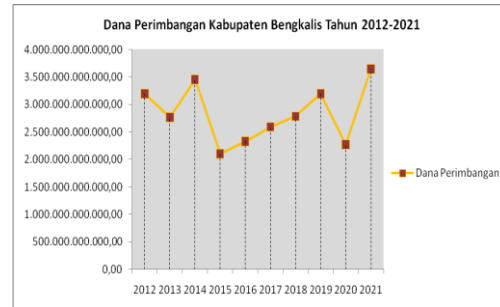
Sumber: Laporan Realisasi PDRB Kabupaten Bengkulu (2023)

Gambar 2. Realisasi PDRB Kabupaten Bengkulu tahun 2012-2021

Dari gambar diatas dapat dilihat pengalokasian produk domestik regional bruto Kabupaten Bengkalis terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pengalokasian produk domestik regional bruto Kabupaten Bengkalis 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 produk domestik regional bruto Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan yang tidak signifikan sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat (Saputra, 2022). Dana Perimbangan tersebut mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Apabila daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pusat, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut dalam kondisi keuangan yang baik.

Berikut diagram realisasi anggaran dana perimbangan Kabupaten Bengkalis 2012-2021:



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkalis

Gambar 3. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bengkalis

Dari gambar diatas dapat dilihat dana perimbangan Kabupaten Bengkalis 2012-2021 berfluktuatif. Dimana terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 kemudian terjadi kenaikan secara berturut-turut dari tahun 2016-2019. Di tahun 2020 dana perimbangan mengalami penurunan yang cukup besar sampai kemudian kembali mengalami kenaikan ditahun 2021.

Paradigma perekonomian dalam suatu daerah atau negara bisa dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting atau bersifat multidimensial yang berdasarkan dalam perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap atau perilaku hidup masyarakat dan perubahan kelembagaan nasional. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam ekonomi (Fatihudin, 2019).

Pembangunan juga dapat meliputi perubahan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sendiri

juga dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2017).

Pengamatan Anda tentang fluktuasi dana perimbangan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2012 hingga 2021 mencerminkan dinamika ekonomi regional yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fluktuasi ini dapat memiliki berbagai penyebab, dan untuk memahaminya, perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi Ekonomi Nasional: Fluktuasi dalam dana perimbangan Kabupaten Bengkalis dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Peningkatan atau penurunan dalam alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sering kali terkait dengan kinerja ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan nasional.
2. Kebijakan Pemerintah Pusat: Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan alokasi dana perimbangan juga dapat berdampak signifikan. Perubahan dalam kebijakan perimbangan fiskal, transfer dana, atau formula alokasi dana dapat mengubah jumlah

yang diterima oleh Kabupaten Bengkalis.

3. Investasi Infrastruktur: Kenaikan dana perimbangan dari tahun 2016 hingga 2019 mungkin mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa termasuk pembangunan jalan, fasilitas pelabuhan, atau proyek-proyek lain yang mendukung pertumbuhan.
4. Perubahan dalam Struktur Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi dana perimbangan dapat terkait dengan perubahan dalam struktur ekonomi daerah. Jika Kabupaten Bengkalis mengalami diversifikasi ekonomi atau pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang lebih produktif, ini bisa memberikan dorongan positif terhadap penerimaan dana perimbangan.
5. Pengaruh Peristiwa Tahunan: Faktor-faktor situasional atau peristiwa tahunan tertentu juga dapat mempengaruhi fluktuasi dana perimbangan. Ini bisa termasuk perubahan dalam keadaan cuaca (penting untuk ekonomi agraris), perubahan dalam harga komoditas, atau dampak peristiwa politik.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat diinginkan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan kemudahan berusaha, dapat membantu mencapai tujuan ini.

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diiringi dengan distribusi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarpemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi daerah seperti Kabupaten Bengkalis dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

2. KERANGKA TEORITIS

Belanja Modal

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Ia juga merupakan investasi sektor publik berupa pengadaan aset tetap, berwujud, dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan, dan aset tetap lainnya

Belanja modal diyakini merupakan jenis belanja yang berkaitan langsung dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal sebagai salah satu komponen belanja langsung APBD menciptakan dampak multiplier effect bagi ekonomi, semakin tinggi tingkat rasio

belanja modal diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin baik.¹ Oleh karena itu analisis belanja modal sering dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya..

Analisis belanja modal sangat penting dalam konteks manajemen keuangan pemerintah karena belanja modal tidak hanya menggambarkan investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek penting terkait analisis belanja modal:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Belanja modal** yang cukup besar dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan fasilitas lainnya, ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian. Misalnya, jalan yang baik dapat mempermudah transportasi barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas industri.
2. **Dampak Multiplier:** Belanja modal memiliki dampak multiplier, yang berarti bahwa setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemerintah dalam belanja modal dapat menciptakan pengeluaran tambahan dalam ekonomi. Ini terjadi karena proyek-proyek infrastruktur sering kali memerlukan tenaga kerja dan bahan baku, yang menciptakan pendapatan tambahan dan menggerakkan ekonomi lokal.
3. **Peningkatan Aset Tetap:** Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan aset tetap pemerintah. Ini dapat berupa investasi dalam properti (seperti gedung dan bangunan), peralatan dan mesin, atau infrastruktur (seperti jalan dan jaringan). Aset-aset ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.
4. **Pengukuran Efektivitas:** Analisis belanja modal juga mencakup pengukuran efektivitasnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang diinvestasikan dalam belanja modal menghasilkan manfaat yang diharapkan. Ini melibatkan pemantauan proyek-proyek untuk memastikan bahwa mereka diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran.
5. **Pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat:** Selain pertumbuhan ekonomi, belanja modal juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur kesehatan dan pendidikan, misalnya, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pendidikan yang lebih baik.
6. **Keseimbangan dengan Belanja Operasional:** Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara belanja modal dan belanja operasional. Belanja operasional mencakup biaya rutin seperti gaji pegawai dan pemeliharaan, sementara belanja modal berkaitan dengan investasi jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah.
7. **Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan:** Selain dampak ekonomi, pemerintah juga

harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek belanja modal. Proyek-proyek tersebut harus mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku serta meminimalkan dampak negatif pada masyarakat lokal.

Dalam analisis belanja modal, penting bagi pemerintah untuk memiliki rencana yang jelas, transparansi dalam penggunaan dana publik, dan mekanisme pemantauan yang efektif. Ini akan membantu memastikan bahwa belanja modal memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB ini terdiri dari 2, yakni PDRB Rill dan PDRB Nominal. PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku, yang menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar tahun berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

Belanja daerah mempengaruhi produk domestik regional bruto. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat PDRB dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran belanja pemerintah seperti pendidikan.

Apabila PDRB meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya di sektor rill dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh meningkatkan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergairahnya perekonomian sehingga

aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat pula. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, pertambahan nilai maupun cukai. Jika penerimaan pemerintah meningkat, maka akan membawa konsekuensi peningkatan pengeluaran pemerintah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a. Dana bagi hasil

Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas, Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribumi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai kebutuhan penyaluran dalam rangka desentralisasi di mana penggunaannya ditetapkan oleh daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *Block grat* yang

diberikan pada semua kabupaten dan kota yang bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan fisikalnya, dan didistribusikan berdasarkan prinsip tertentu dimana daerah miskin atau terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Tujuan Dana Alokasi Khusus adalah membiayai keperluan dasar yang pada dasarnya merupakan kegiatan program nasional baik dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, air bersih, perikanan, pekerjaan umum, pemerintahan, sanitasi, kelautan, pertanian, kehutanan, keluarga berencana, perdagangan dan sarana prasarana desa.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan. Pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam

3. METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi merupakan kelompok atau kumpulan individu-individu atau obyek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, maka populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik (Firdaus, 2021, p. 74). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bengkalis periode 2012-2021.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki kriteria yang sama dan mampu menggeneralisir populasi (Sugiyono, 2018). Sampel

dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkalis periode 2012-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti.

a. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam penelitian.

b. Metode Analisis Statistik

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel *independent* Produk Domestik Regional bruto (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan variabel *dependent* Belanja Modal. akan digunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, maka peneliti

menggunakan bantuan program *software SPSS* versi 26.0. Rumus perhitungan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y : Belanja

Modal

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Produk

Domestik Regional Bruto

X_2 : Dana

Perimbangan

e : *Standard error*

2. Uji Hipotesis

1) Uji F (Uji Serentak)

Uji F (uji serentak) adalah untuk melihat apakah variabel *independent* secara bersama-sama (serentak) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel *dependent*. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$H_0 : b_1 = b_2 = 0$$

Artinya secara bersama-sama (serentak) tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* (Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan variabel *dependent* adalah Belanja Modal.

$$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$$

Artinya secara bersama-sama (serentak) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel *independent* (Produk

Domestik Regional Bruto (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan dan variabel *dependent* adalah Belanja Modal. Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dengan tingkat keyakinan 95%.

2) Uji T (Parsial)

Uji t dimaksudkan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel *independent* (X) terhadap variabel *dependent* (Y). Bentuk pengujiannya yaitu: $H_0: b_i = 0$ (variabel *independent* secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *dependent*). $H_1: b_i \neq 0$ (variabel *independent* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *dependent*).

Nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

H_0 diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} (-) > (-) t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} (-) < (-) t_{tabel}$ $\alpha = 5\%$

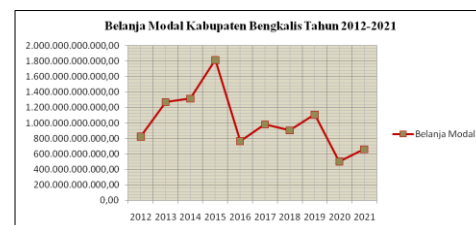
3) Uji Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengetahui signifikansi variabel, harus

dicari koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi melihat seberapa besar pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Koefisien determinasi (R^2) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), ($0 \leq R^2 \leq 1$). Bila determinasi (R^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel *independent* terhadap pengaruh variabel *dependent* semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Dan bila R^2 mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel *independent* adalah besar terhadap variabel *dependent*. Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel *independent* yang diteliti terhadap variabel *dependent*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Belanja Modal (Y)

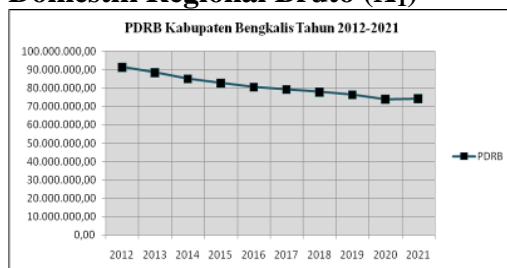


Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 4. Trend Belanja Modal Kabupaten Bengkalis

Dari gambar diatas belanja modal kabupaten bengkalis periode tahun 2012-2021 berfluktuatif. Dimana terjadi kenaikan pada tahun 2015 kemudian mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2016 kemudian terjadi kenaikan dan penurun kembali setiap tahunnya sampai tahun 2021. Pengalokasian belanja modal terendah terjadi pada tahun 2020, hal ini kurang berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi karna belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Analisis Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto (X_1)



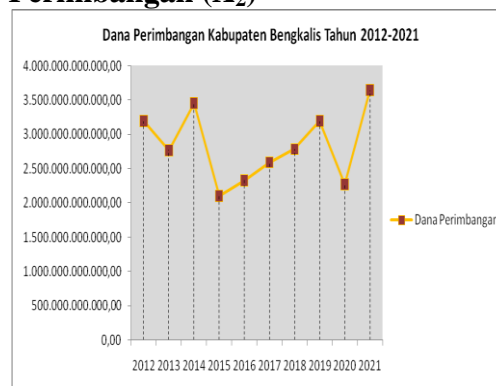
Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 5. Trend Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis

Dari gambar diatas dapat dilihat pengalokasian produk domestik regional bruto Kabupaten Bengkalis 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 produk domestik regional bruto Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan yang tidak signifikan sehingga tidak terlalu berpengaruh

terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Analisis Deskriptif Dana Perimbangan (X_2)



Sumber: Diolah Penulis (2023)

Gambar 6. Trend Dana Perimbangan Kabupaten Bengkalis

Dari gambar diatas dapat dilihat Trend dana perimbangan Kabupaten Bengkalis 10 tahun terakhir bergerak secara fluktuatif. Dimana terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 kemudian terjadi kenaikan secara berturut-turut dari tahun 2016-2019. Di tahun 2020 dana perimbangan mengalami penurunan yang cukup besar sampai kemudian kembali mengalami kenaikan ditahun 2021.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi linier berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel *independent* (Produk Domestik Regional Bruto dan Dana Perimbangan) dan variabel *dependent* (Belanja Modal) akan digunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*). Hasil Analisis Regresi Linier Berganda :

Tabel 1. Hasil Regresi Linier**Berganda**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25.0 (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -867000548922,885 + 28566,400X_1 - 0,152X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal

X₁ : Produk Domestik Regional Bruto

X₂ : Dana Perimbangan

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-867000548922,885	1831927432782,898		-.473
	PDRB (X1)	28566,400	21567,568	,442	1,325
	Dana Perimbangan (X2)	-.152	,244	-.208	-.623

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa:

- Besarnya nilai koefisien X₁ sebesar 28566,400 yang berarti ada pengaruh positif produk domestik regional bruto dengan belanja modal sebesar 28566,400. Hal ini berarti semakin tinggi produk domestik regional bruto maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah

- Besarnya nilai koefisien X₂ sebesar -0,152 yang berarti ada pengaruh negatif dana perimbangan dengan belanja modal sebesar -0,152. Hal ini berarti semakin rendah dana perimbangan maka semakin rendah pula belanja modal

Pengujian Hipotesis**Uji F (Serentak)**

Untuk melihat pengaruh simultan dari variabel *independent* (produk domestik regional bruto dan dana perimbangan) dapat dilakukan dengan uji F (uji serentak). Hasil uji F hitung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	293977891807622000000000	2	1469889459038110	1,014
		00000000,000			,410 ^b
	Residual	1014722710967551200000000	7	1449603872810787	
		50000000,000			
	Total	1308700602775173300000000	9		

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), PDRB (X1)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

$$F_{hitung} = 1,014 < F_{tabel} = 4,74$$

maka tolak H₀ (terima H₁)

$$Sig.tabel = 0,410 > (\alpha) = 0,05$$

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara serentak produk domestik regional bruto dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, dimana H₀ : b₁ = b₂ = 0, artinya tidak terdapat pengaruh simultan dari variabel *independent*

(produk domestik regional bruto (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2)) terhadap variabel *dependent* adalah Belanja Modal (Y).

Uji t (Parsial)

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel *independen* yaitu produk domestik regional bruto (X_1) dan dana perimbangan (X_2) mempengaruhi variabel *dependen* yaitu belanja modal (Y) secara signifikan. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel 3. Hasil Uji t

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-867000548922,885	18319274327		-.473	,650
		82,898			
PDRB (X_1)	28566,400	21567,568	,442	1,325	,227
Dana Perimbangan (X_2)	-.152	,244	-.208	-.623	,553

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25.0 (2023)

Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis Pertama (H_1) yang menyebutkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

$$t_{hitung} = 1,325 < t_{tabel} = 2,364$$

maka tolak H_1 (terima H_0)

$$\text{Sig. tabel} = 0,227 > (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa produk domestik regional bruto (X_1) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Y)

sebagai variable terikat. Dengan demikian besar kecilnya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Bengkalis.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis Kedua (H_2) yang menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

$$t_{hitung} = -0,623 > t_{tabel} = -2,364$$

maka tolak H_2 (terima H_0)

$$\text{Sig. tabel} = 0,553 > (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan (X_2) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal (Y) sebagai variabel terikat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya dana perimbangan tidak akan berdampak terhadap rendahnya belanja modal (Y).

Pengujian Koefisien Determinan (R^2)

Determinan berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel, maka harus dicari koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi melihat seberapa besar pengaruh variabel kemandirian keuangan daerah (X_1), efektivitas PAD (X_2) dan efisiensi keuangan daerah (X_3) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinan (R^2) berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hasil dari pengujian Determinan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,474 ^a	,225	,003	380736637692,09125

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (X2), PDRB (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25.0 (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat:

- Nilai R sebesar 0.474 sama dengan 47,0% yang menunjukkan bahwa hubungan antara produk domestik regional bruto (X₁), dan dana perimbangan (X₂) terhadap belanja modal (Y) hubungannya cukup erat.
- Nilai Adjusted R Square 0,003 berarti 0.3% Belanja Modal Kabupaten Bengkalis (Y) dapat dijelaskan oleh produk domestik regional bruto (X₁) dan dana perimbangan (X₂). Sedangkan sisanya 99,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- Standard Error of Estimate* artinya mengukur variasi dari nilai yang diprediksi. Nilai *Standard Error of Estimatenya* 380736637692,09125 Semakin kecil *Standard Error of Estimatenya* berarti model semakin baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan melalui berbagai pengujian diatas dapat diinterpretasikan bahwa hasil pengujian pengaruh produk domestik regional bruto dan dana perimbangan terhadap belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Ditolak
H ₂	Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 25.0 (2023)

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto mempunyai nilai uji t = 1,325 < nilai t tabel 2,364 dan memiliki nilai signifikansi 0,227, lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian apabila Produk Domestik Regionl Bruto mengalami peningkatan, maka Belanja Modal akan semakin meningkat.

Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Hartati, 2013), (Batu Bara et al., 2022) yang mendapatkan hasil PDRB berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dari hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Perimbangan mempunyai nilai uji $t = -0,623 >$ nilai t tabel $-2,364$ dan memiliki nilai signifikansi $0,227$, lebih besar dari tingkat signifikansi, yakni $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bengkalis. Artinya apabila Dana Perimbangan rendah maka Belanja Modal juga semakin rendah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Yustriawan, 2021) yang mendapatkan hasil dana

perimbangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian (Syukri et al., 2022), (Zulkarnain, 2023) dan (Mundiroh, 2019) bahwa dana perimbangan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bengkalis. Hal ini berarti bahwa dalam konteks penelitian ini, tingkat Dana Perimbangan yang lebih rendah tidak secara signifikan mempengaruhi tingkat Belanja Modal di kabupaten tersebut. Dengan kata lain, apabila Dana Perimbangan mengalami penurunan, Belanja Modal tidak akan secara signifikan menurun bersamanya.

Penting untuk mencatat bahwa hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustriawan pada tahun 2021, yang menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam konteks atau mungkin metodologi penelitian yang digunakan oleh Yustriawan dan penelitian yang Anda sebutkan.

Namun, hasil penelitian Anda sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Syukri et al. pada tahun 2022, Zulkarnain pada tahun 2023, dan Mundiroh pada tahun 2019. Mereka juga menemukan bahwa Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Ini dapat mengindikasikan

bahwa dalam konteks geografis atau waktu yang berbeda, pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dapat bervariasi.

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Kabupaten Bengkalis. Misalnya, adanya perubahan dalam kebijakan pengeluaran daerah, situasi ekonomi, atau faktor-faktor politik yang dapat memengaruhi penggunaan Dana Perimbangan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam perencanaan keuangan daerah, karena dapat membantu pengambil keputusan untuk memahami bagaimana alokasi Dana Perimbangan dapat memengaruhi tingkat Belanja Modal di masa depan. Selain itu, perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal di berbagai konteks lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten Bengkalis. Hal ini

diketahui dari nilai thitung = 1,325 yang memiliki angka lebih kecil dibandingkan ttabel = 2,364 dengan nilai signifikan = 0,227 lebih tinggi dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ditolak. Artinya semakin tinggi PDRB maka belanja modal semakin tinggi.

2. Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten Bengkalis. Hal ini diketahui dari nilai thitung = -0,623 yang memiliki angka lebih kecil dibandingkan ttabel = -2,364 dengan nilai signifikan = 0,553 lebih tinggi dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ditolak. Artinya semakin rendah dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat meningkatkan investasi modal (Belanja Modal) agar tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa dikurangi.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk

kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 9 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya serta

3. Untuk Publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Batu Bara, K. N., Nelsari, M. Y., Diana, S., & Sianturi, E. M. (2022). Pengaruh PDRB, dana perimbangan, dan investasi terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Paradigma Ekonomika*, 17(01).
- Fatihudin, D. (2019). *Membedah Investasi Menuai Geliat Ekonomi*. Deepublish.
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. Dotplus.
- Hartati, H. D. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Balikpapan. *Ekonomika Bisnis*, 04(02).
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 02(01).
- Saputra, B. Y. et. a. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis. *E-Qien*, 11(01).
- Sinambela, L. P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2017). “*Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*.” Kencana.
- Sumarsono, H., Nasikh, & Muslikah, S. (2017). *Indegeneous Ekonomi Pembangunan Daerah*. Gunung Samudera.
- Syukri, M., M, A., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 7(1),. *MAS: Jurnal Manajemen Dan Sains*, 07(01).
- Yustriawan, D. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 05(02).
- Zulkarnain, Z. I. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Perimbangan Terhadap
Belanja Modal Pemerintah
Daerah (Studi Empiris Pada
Kabupaten/Kota Provinsi Maluku
Tahun 2017-2021. *Jurnal Riset
Akuntansi Aksioma*, 22(01).